

RENJA PERUBAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN
2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis kinerja yang mengacu pada Perubahan Renstra dan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025. Diharapkan perubahan Renja Tahun 2025 dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pada saat pelaksanaan APBD Perubahan Tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, 3 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK**

Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Landasan Hukum.....	3
1. 3 Maksud dan Tujuan	6
1. 4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Demak.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..	37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	41
2.4 Review Terhadap Renja 2025	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	54
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	55
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.....	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	59
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	59
4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi..	93
BAB V PENUTUP	99
5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian	99
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	99
5.3 Rencana Tindak Lanjut	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 Triwulan I Kabupaten Demak.....	16
Tabel 2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2025	35
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak	39
Tabel 2.4	Review terhadap Renja tahun 2025 Kabupaten Demak	43
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Demak	54
Tabel 3.1	Target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 ...	57
Tabel 4.1	Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Demak.....	64
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2025 sesuai Renstra PD Tahun 2021-2026	93
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2026 sesuai Program Unggulan Bupati Periode 2025-2029.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renja ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja dimulai dengan melakukan pengolahan data dan informasi, menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJMN. RPJMD sebagai pedoman didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Bersamaan dengan proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan setiap tahun juga menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah menggambarkan Tujuan Jangka Panjang, Strategis-strategis, Sasaran Tahunan dan Indikator Kinerja Sasaran. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan kerangka acuan untuk Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan. Rencana strategis merupakan pedoman Umum dan Jangka Panjang, sedangkan Rencana Kinerja merupakan dokumen yang lebih detail dan terfokus setiap tahun anggaran.

Penyusunan Rencana Strategis dan Perubahan Rencana Kerja tidak terlepas dari system penganggaran dari suatu unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan Sasaran dan Tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran dan ketersediaan anggaran.

Pada anggaran suatu unit organisasi dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan, sehingga Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tahun yang bersangkutan. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2024, disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan (1 tahun), yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Kepala Daerah. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan pada tahap berikutnya RKAP tersebut akan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang ditetapkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten.

1. 2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;

29. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan perubahan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak ini dimaksud untuk:

- a. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan 2025 serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati;
- b. Menjamin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dengan RPJMD Kabupaten Demak;

- c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Kabupaten Demak selama 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dengan tujuan:

- a. Sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Pendek tahunan.
- b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKAP-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam periode 1 (satu) tahun;
- c. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Demak;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1. 4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja PD

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan triwulan I Tahun 2025

Menguraikan tentang kondisi pelayanan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak. Bab ini juga menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja 2025 sampai dengan Triwulan I.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 dan Perubahan 2025.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 dan Perubahannya beserta kerangka pendanaan.

BAB V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Demak

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Penanaman Modal dengan tujuan pertama meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dengan sasaran pertama Terwujudnya pelayanan publik yang responsive, tujuan kedua meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan sasaran kedua meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tujuan ketiga meningkatkan penanaman modal daerah dengan sasaran ketiga meningkatnya nilai investasi. Program dan Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tahun 2025 bersumber dari Dana Alokasi Umum, yaitu APBD.

Pada tahun 2025 anggaran murni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebesar Rp6.367.373.200,00 setelah ada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkait efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang kemudian diturunkan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/0121/2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, di mana seluruh Perangkat Daerah agar melakukan efisiensi/ rasionalisasi anggaran dengan melakukan pemotongan anggaran rekening perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen), sehingga Pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak berkurang sebesar Rp183.563.054,00 menjadi Rp6.183.810.146,00 anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Demak.

Adapun realisasi capaian program/ kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) indikator kinerja Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan tercapai 100% dan persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti tercapai 100%. Pada Program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator dimana 6 (enam) indikator yang belum mencapai target, yaitu (1) indikator Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah tercapai 75%; (2) indikator jumlah laporan barang milik daerah perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi tercapai 50%; (3) Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi tercapai 0%; (4) Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi tercapai 0%; (5) Jasa penunjang urusan yang tersedia tercapai 25% (6) indikator jumlah barang milik daerah yang terpelihara tercapai 34%, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja dimana ada 20 (dua puluh) indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu (1) indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD tercapai 50%; (2) Indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD tercapai 50%; (3) indikator Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN tercapai 96,43%; (4) indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD tercapai 50%; (5) Indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan tercapai 0%; (6) Indikator Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan tercapai 0%; (7) Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan tercapai 0%; (8) Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan tercapai 0% (9) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tercapai 20%; (10) Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu tercapai 0%;

(11) indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tercapai 3,33%; (12) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tercapai 23,53%; (13) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tercapai 25%; (14) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tercapai 25 %; (15) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya tercapai 25%; (16) Jumlah Mebel yang dipelihara tercapai 0%; (17) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara tercapai 0%; (18) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi tercapai 0%; (19) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi tercapai 0%; (20) Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi tercapai 0%.

- b. Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat 1 (satu) indikator jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar tercapai 15,61%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator dimana belum mencapai target yaitu indikator jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar tercapai 15,61% dan ada 3 (tiga) sub kegiatan dengan 3 (tiga) indikator dimana ada 2 (dua) indikator yang belum mencapai target yaitu (1) indikator Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik tercapai 15,61%; (2) Jumlah kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha tercapai 25%.
- c. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdapat 1 (satu) indikator jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) tercapai 75,53%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator dimana belum mencapai target yaitu Jumlah potensi investasi yang diterbitkan tercapai 0% dan 1 (satu) sub kegiatan dengan 1

indikator Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota tercapai 0%.

- d. Program Promosi Penanaman Modal terdapat 1 (satu) indikator rasio promosi terhadap jumlah investor tercapai 0%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan tercapai 0% dan 1 (satu) sub kegiatan dengan 1 (satu) indikator Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota tercapai 0%.
 - e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdapat 1 (satu) indikator jumlah investor (PMDN/PMA) tercapai 35,34%. Pada program ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dengan 3 (tiga) indikator dimana ada 3 (tiga) indikator yang tidak mencapai target (1) Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya tercapai 0%; (2) Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko tercapai 0%; (3) Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha tercapai 0%.
 - f. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal terdapat 1 (satu) indikator jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial tercapai 17%. Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia tercapai 50% dan 1 (satu) sub kegiatan dengan 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yaitu Jumlah data dan informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan tercapai 50%.
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat 2 (dua) indikator kinerja dimana sudah memenuhi target

kinerja yaitu (1) indikator persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti tercapai 100% dan (2) indikator Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan tercapai 100%. Pada Program ini terdapat 7 (tujuh) kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator dimana 1 (satu) indikator telah memenuhi target, yaitu (1) indikator jumlah laporan keuangan tercapai 100%. Pada program ini terdapat 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) indikator dimana ada 7 (tujuh) indikator yang telah memenuhi target yaitu: (1) indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat tercapai 100%; (2) indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tercapai 100%; (3) Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN tercapai 100%; (4) Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan tercapai 100%; (5) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tercapai 100%; (6) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya tercapai 100%; (7) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi tercapai 100%.

3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Pelayanan Penanaman Modal terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dengan 3 (tiga) indikator dimana ada 1 (dua) indikator yang melebihi target yaitu (1) Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan tercapai 140%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan.
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a). Tingkat capaian target kinerja baru s.d triwulan I tahun 2025;
 - b). Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada triwulan II sampai dengan triwulan IV;

- c). Perubahan pagu anggaran karena diusulkan pada pergeseran maupun perubahan anggaran;
 - e). Adanya perbedaan harga pada e katalog dan Satuan Standar Harga (SHS).
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
- a) Terpenuhinya ketersediaan anggaran;
 - b) komitmen bersama untuk mencapai target yang telah ditentukan;
 - c) koordinasi dan komunikasi yang baik antar semua koordinator dan sekretariat.
- c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:
- a). Optimalisasi kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada;
 - b). Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara intensif;
 - c). Optimalisasi Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- Dengan tingkat capaian program s.d triwulan I Tahun 2025 dari 6 (enam) program, dimana 1 (satu) program mencapai 100%, 2 (dua) program tingkat capaiannya diatas 30%, 2 (dua) program tingkat capaiannya dibawah 30%, 1 (satu) program tingkat capaiannya 0%. Hal ini dikarenakan kegiatan direncanakan dilaksanakan pada triwulan berikutnya yaitu triwulan II sampai dengan triwulan IV tahun 2025. Dengan tingkat capaian kinerja ini maka implikasi yang timbul adalah tersedianya pedoman dalam perencanaan tahun depan.
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- a) Perencanaan anggaran diharapkan lebih efisien dan efektif berdasarkan kinerja.

b) Optimalisasi komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran dengan semua pihak yang terkait.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s.d triwulan I tahun 2025 sebagaimana Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2. 1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 Triwulan I Kabupaten Demak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)
	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	1 8 1	0 1								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
2	1 8 1	2. 02								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan (dokumen)	5	3	1	1	100,00%	1	4	100,00%
2	1 8 1	2. 02	0 0 0 1							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan	28	27	28	27	96,43%	28	27	96,42%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025			
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)		
		tunjangan ASN (orang/bulan)										
2	10202	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	55	32	10	10	100,00%	10	42	95,45%
2	101	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah (dokumen)	32	16	8	6	75,00%	8	24	100,00%
2	101	201	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	4	2	1	1	100,00%	1	3	100,00%
2	101	202	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	8	4	2	1	50,00%	2	6	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025					
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)				
		dokumen RKA-SKPD (dokumen)												
2	1 8	0 1	2. 01	0 0 0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (dokumen)	8	2	2	1	50,00%	2	6	100,00%
2	1 8	0 1	2. 01	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil kordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12	6	3	3	100,00%	3	9	100,00%
2	1 8	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025					
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)				
2	1 8	0 1	2. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD Perangkat Daerah yang sudah direkonsiliasi (laporan)	8	4	2	1	50,00%	2	6	100,00%
2	1 8	0 1	2. 03	0 0 0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	8	4	2	1	50,00%	2	6	100,00%
2	1 8	0 1	2. 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	0%	0,00%	100%	100%	100,00%
2	1 8	0 1	2. 05	0 0 0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	5	3	1	0	0,00%	1	4	100,00%
2	1 8	0 1	2. 05	0 0 0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	40	40	40	0	0,00%	40	40	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)
		Pendidikan dan Pelatihan (orang)								
2	1 8 1 2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	25%	25,00%	100%	100,00%
2	1 8 1 2. 06 0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	4	3	1		0,00%	1	4 100,00%
2	1 8 1 2. 06 0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	4	3	1	1	100,00%	1	4 100,00%
2	1 8 1 2. 06 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	4	3	1		0,00%	1	4 100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025		
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)	
2	1 8 1 06 0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4	3	1	1	100,00%	1	4	100,00%
2	1 8 1 06 0 0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dokumen)	108	78	30	6	20,00%	30	108	100,00%
2	1 8 1 06 0 0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	3	2	1	0	0,00%	1	3	100,00%
2	1 8 1 06 0 0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	485	386	150	5	3,33%	150	536	110,51%
2	1 8 1 07 0 0 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	16.500	12.250	4.250	1.000	23,53%	4.250	16.500	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)
		pada SKPD (dokumen)								
2	1 8 1 2. 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan (unit)	40	170				170	425,00%
2	1 8 1 2. 0 7	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)	8	4				4	100,00%
2	1 8 1 2. 0 7	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	30	234				234	780,00%
2	1 8 1 2. 0 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	24	60				60	250,00%
2	1 8 1 2. 0 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	3	5				5	83,33%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025		
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)	
		Lainnya yang Disediakan (unit)									
2	102.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (unit)	1	1				1	100,00%	
2	102.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	100%	25%	25,00%	100%	100,00%	
2	102.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	48	36	12	3	25,00%	12	48	100,00%
2	102.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	48	36	12	3	25,00%	12	48	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025		
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)	
2	1 8 0 1 2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara (unit)	264	212	76	26	34,21%	76	288	109,09%
2	1 8 0 1 2. 09 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	1	1	1	1	100,00%	1	4	100,00%
2	1 8 0 1 2. 09 0 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	20	19	20		0,00%	20	20	100,00%
2	1 8 0 1 2. 09 0 0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara (unit)	9	62	2		0,00%	2	68	971,42%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)
2	1 8 1 2. 09 0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (unit)	140	82	50	0,00%	50	132	94,28%
2	1 8 1 2. 09 0 0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (unit)	1	1	1	0,00%	1	1	100,00%
2	1 8 1 2. 09 0 0 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	15	18	5	0,00%	5	23	153,33%
2	1 8 1 2. 09 0 0 1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	46	48	1	100,00%	1	49	106,52%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)
		Direhabilitasi (unit)								
2	184	Program Pelayanan Penanaman Modal	26.750	14.963	6.850	1.069	15,61%	6.850	21.813	81,54%
2	184	2.01 Pelayan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	26.750	14.963	6.850	1.069	15,61%	6.850	21.813	81,54%
2	184	2.016 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha berbasis resiko Terintegrasi secara Elektronik	26.750	14.963	6.850	1.069	15,61%	6.850	21.813	81,54%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025		
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)	
		secara Elektronik (pelaku usaha)									
2	1842.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha (kegiatan usaha)	155	147	40	10	25,00%	40	187	120,64%
2	1842.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi	20	34	5	7	140,00%	7	26	130,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025			
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)		
		secara elektronik (pelaku usaha)										
2	182	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah nilai Investasi (PMDN/PMA)	Rp.4.190.000.000.000	Rp. 6.609.708.150.000	Rp. 3.200.000.000.000	Rp.2.416.874.231.952	75,53%	Rp. 3.200.000.000.000	Rp. 9.809.708.150.000	243,12%	
2	182	2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah potensi investasi yang diterbitkan (buku)	696	522	174	0,00%	174	696	100,00%	
2	182	2.02	0001	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah peraturan daerah (Perda) rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/ kota (dokumen)	1	1	-	-	1	100,00%	
2	182	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota (dokumen)	696	522	174	0,00%	174	696	100,00%
2	183		Program Promosi Penanaman Modal	Rasio promosi terhadap jumlah investor	0,61	0,71	0,17	0,00%	0,17	0,88	144,26%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025				
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)			
2	1 8	3	2. 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan (laporan)	11	8	3	0,00%	3	11	100,00%	
2	1 8	3	2. 01	0 0 0 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (dokumen)	11	8	3	0,00%	3	11	100,00%	
2	1 8	5		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor (PMDN/PMA) (investor)	1.850	4.254	1.760	622	35,34%	1.760	6.014	325,08%
2	1 8	5	2. 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	10%	15,15%	10%	0	0,00	10%	10%	100,00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)
2	1 8 5 2. 01 0 0 0 4	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya (kegiatan usaha)	125	248	25	0,00%	25	273	218,40%
2	1 8 5 2. 01 0 0 0 5	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko (pelaku usaha)	800	1.370	200	0,00%	200	1.570	196,25%
2	1 8 5 2. 01 0 0 6	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang telah dianalisis dan diverifikasi data,	275	572	50	0,00%	50	622	226,18%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025			
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)		
		profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan, serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)										
2	186	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial (data)	1.200	1.067	300	51	17,00%	300	1.367	113,91%	
2	186	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/ kota yang tersedia (data)	408	624	102	51	50,00%	102	726	177,94%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Kondisi Akhir Tahun 2025	Realisasi Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025			Target Kinerja Renja Tahun 2025 (perkiraan realisasi kinerja renja 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025					
					Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi s.d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian (%) s.d Triwulan I Tahun 2025		Realisasi s.d Triwulan IV Tahun 2025	Tingkat Capaian s.d Triwulan IV Tahun 2025 (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+9)	11= (10/4)				
2	1 8	6	2. 01	0 0 0 2	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan (dokumen)	408	624	102	51	50,00%	102	726	177,94%

Adapun evaluasi pelaksanaan program unggulan Bupati sampai dengan triwulan I tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak melaksanakan 2 (dua) program unggulan Bupati/Wakil Bupati yaitu:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Smart City, dengan rencana implementasi:
 - 1). Mall Pelayanan Publik (MPP), dengan indikator Jumlah layanan yang beroperasi di Mall Pelayanan Publik dari target 22 unit tercapai 30 unit pada triwulan I tahun 2025 atau 136%.
Pada Implementasi ini terdapat dukungan kegiatan:
 - a). Koordinasi dan Monev MPP, dengan indikator Jumlah kegiatan koordinasi dan monev MPP dari target 4 kegiatan s.d triwulan I tahun 2025 belum tercapai atau 0%.
 - b). Pengadaan mebelair MPP, dengan indikator Jumlah mebelair tidak ada target pada tahun 2025.
 - c). Pengadaan peralatan MPP, dengan indikator Jumlah peralatan tidak ada target pada tahun 2025.
2. Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat, dengan rencana implementasi:
 - 1). Peningkatan investasi, dengan indikator Persentase peningkatan investasi dari target 0,05% belum tercapai atau 0%, dengan dukungan kegiatan:
 - a). Promosi investasi, dengan indikator Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi dari target 3 laporan s.d triwulan I tahun 2025 tercapai 0 laporan atau 0%;
 - b). Insentif investasi, dengan indikator Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha tidak ada target pada tahun 2025;
 - c). Monitoring dan evaluasi investasi, dengan indikator Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan monev dari target 50 pelaku usaha s.d triwulan I tahun 2025 belum tercapai atau 0%;
 - 2). Kemudahan perizinan usaha mikro, dengan indikator Persentase pengajuan izin usaha mikro dari target 90 s.d triwulan I tahun 2025 tercapai 100%.

- a). Sosialisasi perizinan usaha mikro, dengan indikator jumlah pelaku UMK yang mendapatkan sosialisasi dari target 100 UMK s.d triwulan I tahun 2025 belum tercapai atau 0%.

Adapun Pelaksanaan program unggulan Bupati sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2
Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Tahun 2025

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2024		2025 s.d Triwulan I						2026		Perkiraan realisasi s.d. 2026		Kode Sub kegiatan
						Realisasi Kinerja	Realisasi	Target		Realisasi		Tingkat Realisasi		Target Kinerja (APBD)	Target	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi	
							Anggaran	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Anggaran (APBD)	Realisasi					
							Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)	Target Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (11/9)	14= (12/10)	15	16	17= 7+11+15	18= 8+12+16	19
2	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY'																	
F	Mall Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah layanan yang beroperasi di Mall Pelayanan Publik	unit		22	30	1.015.893.700	22	20.000.000	30		136,36	0,00	22	20.000.000	30	1.035.893.700	
1	Koordinasi dan Monev MPP	Jumlah kegiatan koordinasi dan monev MPP	Kegiatan		19	11	60.000.000	4	20.000.000			0,00	0,00	4	20.000.000	15	80.000.000	2.18.01.2.06.09
2	Pengadaan mebelair MPP	Jumlah mebelair	paket		1	1	195.326.700									1	195.326.700	2.18.01.2.07.05
3	Pengadaan peralatan MPP	Jumlah peralatan	unit		47	47	760.567.000									47	760.567.000	2.18.01.2.07.06
8	PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT																	

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	Target Akhir Renstra (2026)	2024		2025 s.d Triwulan I						2026		Perkiraan realisasi s.d. 2026		Kode Sub kegiatan
						Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Target		Realisasi		Tingkat Realisasi		Target Kinerja (APBD)	Target Anggaran (APBD)	Realisasi Kinerja (APBD)	Realisasi Anggaran (APBD)	
								Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (APBD)	Anggaran (APBD)	Kinerja (%)	Anggaran (%)					
						13= (11/9)	14= (12/10)	15	16	17= 7+11+15	18= 8+12+16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= (11/9)	14= (12/10)	15	16	17= 7+11+15	18= 8+12+16	19
A	Peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi	%	0,22	0,22	3,11	710.218.556	0,05	65.293.000	-0,70		0,00	0,00	0,06	405.000.000	3,17	1.115.218.556	
1	Promosi investasi	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi	Laporan	3	14	8	292.008.256	3	49.173.000			0,00	0,00	3	200.000.000	11	492.008.256	
2	Insentif investasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	Kegiatan usaha		3									1	45.000.000	1	45.000.000	2.18.02.2.01.02
3	Monitoring dan evaluasi investasi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan monev	Pelaku usaha	100	1250	817	418.210.300	50	16.120.000			0,00	0,00	250	160.000.000	1067	578.210.300	2.18.05.2.01.03
G	Kemudahan perizinan usaha mikro	Persentase pengajuan izin usaha mikro yang diterbitkan	%		90	100	388.991.800	90	16.920.500			0,00	0,00	90	103.620.000	100	492.611.800	
1	Sosialisasi perizinan usaha mikro	Jumlah pelaku UMK yang mendapatkan sosialisasi	UMK	35	500	645	388.991.800	50	16.920.500			0,00	0,00	100	103.620.000	745	492.611.800	2.18.05.2.01.02

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka urusan penanaman modal merupakan urusan wajib bukan pelayanan dasar yang tidak termasuk didalam pelayanan dasar dalam stándar pelayanan minimal.

Berdasarkan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak 2021-2026, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal, pada tahun 2023 terealisasi 90,75 dari target 87 atau 104,31%, pada 2024 terealisasi 91,02 dari target 91 atau 100,02. Pada triwulan I tahun 2025 terealisasi 91,00 dari target 91,40 atau 99,56%.
2. Indikator kinerja Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, pada tahun 2023 terealisasi 100% dari target 83% atau tercapai 120,48%, pada tahun 2024 terealisasi 100% dari target 86% atau 116,28 dan pada tahun 2025 triwulan I terealisasi 100% dari target 86% atau tercapai 116,28%. Semua keluhan masyarakat telah ditindaklanjuti.
3. Indikator Kinerja nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 realisasi 81,36 dari target 80,93 atau 100,53%, pada tahun 2024 terealisasi 81,4 dari target 81,4 atau tercapai 100,00%. Nilai triwulan I tahun 2025 belum diketahui.
4. Indikator Kinerja Persentase Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 realisasi 100% dari target 100%, dan pada tahun 2024 realisasi 100% dari target 100%. Pada triwulan I tahun 2025 belum diketahui.
5. Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan Berusaha pada tahun 2023 terealisasi 3 hari dengan capaian 100% dari target 3 hari dan pada tahun 2024 terealisasi 1 hari dengan capaian 150% dari target 3 hari

Pada triwulan I tahun 2025 terealisasi 1 hari dengan capaian 150% dari target 2 hari. Hal ini antara lain karena proses pelayanan perizinan telah menggunakan teknologi informasi secara online.

6. Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan PMA pada tahun 2023 terealisasi 1.676 proyek dengan capaian 356,59% dari target 470 proyek, meningkat 1.157 proyek. Dan pada tahun 2024 terealisasi 2.059 dari target 495 proyek meningkat 383 proyek Hal ini disebabkan antara lain minat pelaku usaha dalam negeri untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM meningkat. Pada triwulan I tahun 2025 belum diketahui disebabkan realisasi investasi belum rilis oleh Kementerian Investasi/ BKPM RI.
7. Persentase Peningkatan Investasi pada tahun 2023 terealisasi 2,23 dari target 0,03 tercapai 7433,33%, dan pada tahun 2024 terealisasi 0,23 dari target 0,04 tercapai 575%. Adapun Persentase peningkatan investasi menggunakan rumus jumlah proyek tahun n dikurangi jumlah proyek tahun n-1 dibagi jumlah proyek tahun n-1 dikalikan 100% $((2.059-1.676) / 1.676 * 100\%) = 0,23\%$. Pada triwulan I tahun 2025 belum diketahui disebabkan realisasi investasi belum rilis oleh Kementerian Investasi/ BKPM RI.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Demak

N O	Indikator	IK U	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 Triwulan I	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		9	10		11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	V			87	89	91	93	90,95	91,02	91,00	91,40	93	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada Perempan RB No.14 Tahun 2017. Formulasi perhitungan IKM yaitu Total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	V			83	86	90	95	100	100	100	100	100	Jumlah keluhan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh keluhan masyarakat yang masuk dikalikan seratus persen
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	V			80,93	80,96	80,99	81,02	81,36	81,40	N/A	81,52	81,54	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada tahun evaluasi
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	V			100	100	100	100	100	100	N/A	100	100	Jumlah indikator kinerja sasaran strategis yang mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator kinerja sasaran strategis dikalikan seratus persen

N O	Indikator	IK U	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 Triwulan I	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		9	10		11	12	13
5	Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	V			3	3	2	2	3	1	1	1	1	Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan izin dibagi jumlah izin yang terbit
6	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	V			450	470	495	525	1.676	2.059	622	2.550	3.188	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA tahun n
7	Persentase Peningkatan Investasi	V		V	0,03	0,04	0,05	0,06	2,23	0,23	-0,70	0,24	0,25	Jumlah proyek investasi tahun n dikurangi jumlah proyek investasi tahun n-1 dibagi jumlah proyek investasi tahun n-1 dikalikan seratus persen

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagai berikut:

a) Kurangnya tenaga ahli di bidang penanaman modal
Terbatasnya sumber daya manusia di bidang penanaman modal yang kompeten dan hanya ada satu tenaga pendamping dalam pelayanan perizinan melalui OSS RBA dan Si Invest.

b) Masih adanya kesan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) membutuhkan waktu lama.

Hal ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran pada OPD teknis tentang kewenangan dan kewajiban yang dimiliki tentang perizinan dan penanaman modal sesuai urusan. Adanya regulasi terkait perizinan IMB melalui sistem aplikasi PBG, adanya Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

c) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (digitalisasi) untuk promosi investasi.

Kegiatan promosi investasi masih dilakukan dengan mengikuti pameran baik di tingkat regional maupun nasional.

Solusi/penyelesaian permasalahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa datang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak antara lain:

1. Mendorong petugas yang terlibat dalam proses perizinan dan pelayanan investasi untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD teknis terkait dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk kegiatan promosi investasi.

2.4 Review Terhadap Renja 2025

Pada rancangan awal RKPD tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan pagu Rp6.527.090.200,00 namun pada pembagian pagu APBD mendapatkan alokasi pagu sebesar Rp6.367.373.200,00 atau berkurang sebesar Rp159.717.000,00. Pada awal tahun 2025 pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang kemudian diturunkan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/0121/2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, di mana seluruh Perangkat Daerah agar melakukan efisiensi/ rasionalisasi anggaran dengan melakukan pemotongan anggaran rekening perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen), sehingga Pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak berkurang sebesar Rp183.563.054,00 menjadi Rp6.183.810.146,00.

Pada perubahan renja tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak setelah membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, program dan kegiatan tidak jauh berbeda dengan program dan kegiatan dengan usulan pagu sesuai kebutuhan sebesar Rp6.251.916.371,00 atau bertambah sebesar Rp68.106.255,00

Tabel 2. 4
Review terhadap Renja tahun 2025 Kabupaten Demak

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				6.527.090.200	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				6.251.916.371	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.527.090.200	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.265.916.371	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				933.620.108	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				265.844.054	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	1.060.000.000.000	34.607.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	4.448.000.000.000	31.893.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah potensi investasi yang diterbitkan	174	34.607.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah potensi investasi yang diterbitkan	174	31.893.000	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	174	34.607.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	174	31.893.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Rasio promosi terhadap jumlah investor	0,17	74.043.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Rasio promosi terhadap jumlah investor	0,12	49.173.000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	3	74.043.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	3	49.173.000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	74.043.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3	49.173.000	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	6850	125.104.608	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	6.850	79.131.554	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Demak	Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar	6850	125.104.608	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Demak	Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar	6.850	79.131.554	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Demak	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	6.850	90.158.608	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kab. Demak	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	6.850	56.135.554	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terintegrasi secara Elektronik			Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Demak	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5	22.157.000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Demak	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5	15.832.000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Demak	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40	12.789.000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Demak	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	40	7.164.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah investor (PMDN/PMA)	1.760	621.385.500	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah investor (PMDN/PMA)	2.550	34.630.500	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi	Kab. Demak	Persentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian	10	621.385.500	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi	Kab. Demak	Persentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian	10	34.630.500	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Penanaman Modal			Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Penanaman Modal			
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Demak	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	25	92.062.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Demak	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10	1.590.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Demak	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200	330.011.500	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Demak	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50	16.920.500	
	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Demak	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50	199.312.000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Demak	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50	16.120.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Demak	Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial	300	78.480.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Kab. Demak	Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial	325	71.016.000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia	102	78.480.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Demak	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia	102	71.016.000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Demak	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	102	78.480.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Demak	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	102	71.016.000	
	NON URUSAN	Kab. Demak			5.593.470.092	NON URUSAN	Kab. Demak			5.986.072.317	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				5.593.470.092	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				5.986.072.317	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 100	5.593.470.092	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	100 100	5.986.072.317	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	8	60.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	8	67.447.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	13.927.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	7.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	7.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	3	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	3	38.520.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah laporan keuangan	1	4.408.207.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah laporan keuangan	1	4.895.679.425	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	4.149.708.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Demak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	4.641.980.225	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11	258.499.200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9	253.699.200	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah laporan barang milik daerah perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi	2	3.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Demak	Jumlah laporan barang milik daerah perangkat daerah yang sudah direkonsiliasi	2	3.500.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	3.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	3.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Demak	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	221.804.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Demak	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	206.540.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	40.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Demak	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	57.500.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	40	181.804.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Kab. Demak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	45	149.040.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Pendidikan dan Pelatihan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Demak	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	292.227.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Demak	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	281.002.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4.224.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.191.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	50.148.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Demak	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	41.250.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Demak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	51.250.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	3.752.900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	3.752.900	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Demak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	4.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Demak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	4.000.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	117.660.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4250	14.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Demak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4250	14.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Demak	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan		-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	
	Pengadaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	Pengadaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak	Jasa penunjang urusan yang tersedia	100	223.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak	Jasa penunjang urusan yang tersedia	100	147.472.200	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.300.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	220.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Demak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	144.172.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	76	384.431.492	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Demak	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	76	384.431.492	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	68.481.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	69.078.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	79.363.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Demak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	75.766.000	

No	Renja 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5	30.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Demak	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	30.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	33.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	33.900.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	99.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	99.000.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	31.219.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	34.219.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	42.468.492	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Demak	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	42.468.492	
					6.527.090.200					6.251.916.371	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tidak ada program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota.

Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Demak

No	RENJA 2024				Perubahan RENJA 2024					Catatan
	Pekerjaan / Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Pekerjaan / Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NIHIL										

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025 – 2029 adalah penguatan fondasi transformasi social; ekonomi; tata Kelola; supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan social budaya dan ekologi. Pada rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, Tema Pembangunan Pulau Jawa adalah Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan. Sedangkan Tema Pembanguna Jawa Tengah adalah Penumpu Ketahanan Pangan dan Rantai Nilai Industri Nasional.

Isu strategis Jawa Tengah yang utama adalah tentang kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi serta pendapatan per kapita masyarakat yang masih rendah jika dibandingkan tingkat nasional dan provinsi lain, terutama di Jawa dan Bali. Isu kesejahteraan masyarakat tersebut terkait dengan isu perekonomian daerah, kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Dalam RPD Tahun 2024-2026 dirumuskan isu strategis Provinsi Jawa Tengah adalah: 1) Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; 2) Kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; 3) Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta 4) Tata kelola pemerintahan yang dinamis. Selanjutnya, berdasarkan isu strategis tersebut dan tetap memperhatikan berbagai kebijakan nasional dan amanat regulasi, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Sampai dengan tahun 2026, tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah diarahkan

pada “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”. Tujuan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat sasaran daerah yaitu: 1) Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan; 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif; 3) Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta 4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memiliki tugas untuk mendukung dan melaksanakan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih tahun 2021 – 2026. Visi bupati dan wakil bupati terpilih tahun 2021 – 2026 adalah “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”. Sedangkan misi yang didukung dan dilaksanakan adalah misi ke-1 (satu) “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Serta Kehidupan Bermasyarakat Yang agamis, Kondusif dan Berbudaya” dan misi ke-3 (tiga) “Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran”, dengan program unggulan Peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis “ Smart City” dengan rencana implemtasi Mal Pelayanna Publik dan Program unggulan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dengan rencana implementasi peningkatan investasi dan kemudahan perijinan usaha mikro.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan terwujud dalam jangka waktu lima tahun ke depan atau pada saat masa Renstra berakhir. Sedangkan sasaran, kondisi yang diharapkan terwujud dalam jangka waktu 1 tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2025 adalah:

1. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal dengan target 91,40, pada perubahan renja target 91,40;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu indikatornya Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan target

81,50 pada perubahan renja target 81,52;

- 3) Meningkatkan penanaman modal daerah indikatornya Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA dengan target 495 proyek, pada perubahan renja target 2.550 proyek.

2. Sasaran

- 1) Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif, 2 (dua) indikator:
 - a). Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target 90%, pada perubahan renja target 100%;
 - b). Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha dengan target 3 hari, pada perubahan renja target 1 hari;
- 2) Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu indikatornya Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target dengan target 100%, perubahan renja target 100%;
- 3) Meningkatnya Nilai Investasi indikatornya Persentase Peningkatan Investasi dengan target 0,05 pada perubahan renja target 0,24.

Tabel 3. 1 Target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Indikator	Realisasi		Target		
			2024	2025 TW 1	RPJMD pada Tahun 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025
1	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	91,02	91,00	91	91,40	91,40
2	Sasaran 1: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	90	90	100
		Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	1	1	2	1	1
3	Tujuan 2: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,40	N/A	80,99	81,5	81,52

No	Uraian	Indikator	Realisasi		Target		
			2024	2025 TW 1	RPJMD pada Tahun 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025
4	Sasaran 2: Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	100	N/A	100	100	100
6	Tujuan 3 : Meningkatkan Penanaman Modal Daerah	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	2.059	N/A	495	1.760	2.550
7	Sasaran 3 : Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan Investasi	0,23	N/A	0,05	0,05	0,24

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan digunakan:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- b. Visi, Misi dan program unggulan Bupati dan wakil Bupati terpilih yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Demak.
- c. Cascading Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak telah disesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum di dalam Cascading Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tersebut diatas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada APBD Tahun 2025 melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar

Rp6.367.373.200 Pagu anggaran yang bersumber dari Dana alokasi umum. Pada awal tahun 2025 pemerintah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang kemudian diturunkan melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/0121/2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025, di mana seluruh Perangkat Daerah agar melakukan efisiensi/ rasionalisasi anggaran dengan melakukan pemotongan anggaran rekening perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen), sehingga Pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak berkurang sebesar Rp183.563.054,00 menjadi Rp6.183.810.146,00.

Pada perubahan renja tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak setelah membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, program dan kegiatan tidak jauh berbeda dengan program dan kegiatan dengan usulan pagu sesuai kebutuhan sebesar Rp6.251.916.371,00 atau bertambah sebesar Rp68.106.255,00.

Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan:

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan:

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan:

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan:

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan:

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan Mebel
- d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan:

1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- a) Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- a) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan:

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

- a) Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik.
- b) Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha Berbasis Resiko.
- c) Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan berusaha Berbasis Resiko.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan:

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- a) Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
- b) Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha;
- c) Pengawasan Penanaman Modal

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- a) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Rumusan program, kegiatan dan subkegiatan diatas telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, tetapi pagu indikatif mengalami perubahan penurunan atau kenaikan pada masing masing program, kegiatan dan subkegiatan.

Adapun rencana Program, kegiatan dan subkegiatan beserta tolak ukur kinerja dan pagu indikatif dapat diuraikan secara detail pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kabupaten Demak

Perangkat Daerah: DPMPTSP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								6.527.090.200,00	6.367.373.200,00	6.251.916.371,00	-275.173.829,00							7.125.832.814,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.527.090.200,00	6.367.373.200,00	6.251.916.371,00	-275.173.829,00							7.125.832.814,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							6.527.090.200,00	6.367.373.200,00	6.251.916.371,00	-275.173.829,00							7.125.832.814,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan				100 %	100 %	5.593.470.092,00	6.017.636.092,00	5.986.072.317,00	27.362.722,00							5.620.832.814,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	67.447.000,00	7.447.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2.	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				
	2.18.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	13.927.000,00	3.927.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	2. Peningkatan tata kelola			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>												memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01 .2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.0 00,00	7.500.000, 00	7.500.000, 00	0,00	Kab. Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			20.000.000 ,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	3 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	38.520.000,00	3.520.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan keuangan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	4.408.207.200,00	4.853.973.200,00	4.895.679.425,00	487.472.225,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN, Non ASN		4.056.732.814,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				28 Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	4.149.7 08.000, 00	4.573.874. 000,00	4.641.980. 225,00	492.272.225, 00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			3.778.332. 814,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01 .2.02.0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				10 Dokumen	9 Dokumen	258.499. .200,00	280.099.2 00,00	253.699.2 00,00	4.800.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis			278.400.00 0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															judi, dan penyeludupan.	smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				SATU PINTU
	2.18.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi				2 Laporan	2 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	BMD		4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01 .2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan			4.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															<p>pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.</p>	<p>han dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city</p>				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	221.804.000,00	221.804.000,00	206.540.000,00	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	ASN, Non ASN		344.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	57.500.000,00	17.500.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			44.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01 2.05.0 009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				40 Orang	45 Orang	181.804.000,00	181.804.000,00	149.040.000,00	- 32.764.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pelayanan publik berbasis smart city				
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	292.227.400,00	292.227.400,00	281.002.200,00	-11.225.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	BMD,ASN, Non ASN, Masyarakat		595.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.224.500,00	4.224.500,00	10.191.300,00	5.966.800,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan			7.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	50.148.000,00	5.148.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			98.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan			55.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													<p>1. pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.</p> <p>2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city</p>	<p>1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city</p> <p>2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city</p>				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.250.000,00	41.250.000,00	51.250.000,00	10.000.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				30 Dokumen	30 Dokumen	3.752.900,00	3.752.900,00	3.752.900,00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			6.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				
	2.18.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				150 Laporan	150 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	117.660.000,00	- 32.340.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				4250 Dokumen	4250 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan			23.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				N TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jasa penunjang urusan yang tersedia</i>				100 %	100 %	223.300.000,00	201.700.000,00	147.472.200,00	- 75.827.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	SARANA KANTOR		135.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAH AN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	3.300.0 00,00	3.300.000, 00	3.300.000, 00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkata n tata kelola pemerinta han dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkata n tata kelola pemerinta han dan pelayanan publik berbasis smart city			5.500.000, 00	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
	2.18.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	220.000 .000,00	198.400.0 00,00	144.172.2 00,00	- 75.827.800,0 0	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkata n tata kelola pemerinta han dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkata n tata kelola pemerinta han dan			130.000.00 0,00	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pelayanan publik berbasis smart city				
	2.18.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara				76 unit	76 unit	384.431.492,00	384.431.492,00	384.431.492,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	BMD		365.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01 .2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	68.481.000,00	68.481.000,00	69.078.000,00	597.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																n tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				
	2.18.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	20 Unit	79.363.000,00	79.363.000,00	75.766.000,00	- 3.597.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan			5.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pengecahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	han dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	50 Unit	33.900.000,00	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	5 Unit	31.219.000,00	31.219.000,00	34.219.000,00	3.000.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	42.468.492,00	42.468.492,00	42.468.492,00	0,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)				3200000000 Rupiah	4448000000000 Rupiah	34.607.000,00	34.607.000,00	31.893.000,00	15.393.000,00							50.000.000,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah potensi investasi yang diterbitkan</i>				174 Dokumen	174 Dokumen	34.607.000,00	34.607.000,00	31.893.000,00	- 2.714.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	2. Peningkatan tata kelola	asyarakat		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02 .2.02.0 004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>				174 Dokumen	174 Dokumen	34.607. 000,00	34.607.00 0,00	31.893.00 0,00	- 2.714.000,00	Kab. Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			50.000.000 ,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rasio promosi terhadap jumlah investor				0,17 Angka	0,12 Angka	74.043.000,00	56.573.000,00	49.173.000,00	125.957.000,00							200.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	"Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan"				3 Laporan	3 Laporan	74.043.000,00	56.573.000,00	49.173.000,00	- 24.870.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	asayarakat		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	74.043.000,00	56.573.000,00	49.173.000,00	- 24.870.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																n tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city					
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar				6850 Ketetapan	6850 Ketetapan	125.104.608,00	125.104.608,00	79.131.554,00	364.895.392,00							490.000.000,00		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar				6850 ketetapan	6850 ketetapan	125.104.608,00	125.104.608,00	79.131.554,00	- 45.973.054,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	asayarakat		490.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan				6850 Pelaku Usaha	6850 Pelaku Usaha	90.158.608,00	90.158.608,00	56.135.554,00	- 34.023.054,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	2. Peningkatan tata kelola			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik												sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04 .2.01.0 007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	22.157.000,00	22.157.000,00	15.832.000,00	- 6.325.000,00	Kab. Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04 .2.01.0 008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	12.789. 000,00	12.789.00 0,00	7.164.000, 00	- 5.625.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkata n tata kelola pemerinta han dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkata n tata kelola pemerinta han dan pelayanan publik berbasis smart city			90.000.000 ,00	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor (PMDN/PMA)				1760 Proyek/ investor	2550 Proyek/ investor	621.385 .500,00	54.972.50 0,00	34.630.50 0,00	- 106.385.500, 00							515.000.00 0,00	
	2.18.05 .2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>"Persentase perusahaan yang telah dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal" Prosentase perusahaan yang telah</i>				10 %	10 %	621.385 .500,00	54.972.50 0,00	34.630.50 0,00	- 586.755.000, 00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkata n tata kelola pemerinta han dan pelayanan publik berbasis smart city 2.	asyarakat		515.000.00 0,00	DINAS PENANAM AN MODAL DAN PELAYANA N TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>dilakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>													Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				
	2.18.05.2.01.004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				50 Kegiatan Usaha.	10 Kegiatan Usaha.	92.062.000,00	4.440.000,00	1.590.000,00	- 90.472.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan</i>				200 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	330.011.500,00	24.320.500,00	16.920.500,00	- 313.091.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis	2. Peningkatan tata kelola			270.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>												sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05 .2.01.0 006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan</i>				50 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	199.312.000,00	26.212.000,00	16.120.000,00	- 183.192.000,00	Kab. Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city			160.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
			Perizinan Berusaha																	
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial				300 Data	325 Data	78.480.000,00	78.480.000,00	71.016.000,00	171.520.000,00							250.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia				102 data	102 data	78.480.000,00	78.480.000,00	71.016.000,00	- 7.464.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city	asyarakat		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha				102 Dokumen	102 Dokumen	78.480.000,00	78.480.000,00	71.016.000,00	- 7.464.000,00	Kab. Demak, Demak, Bintoro	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan												nilai tambah di dalam negeri.	publik berbasis smart city 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis smart city				TERPADU SATU PINTU	
J U M L A H									6.527.090.200,00	6.367.373.200,00	6.251.916.371,00	-275.173.829,00								7.125.832.814,00	

4.2 Program Prioritas dan Rencana Implementasi

Adapun rencana Program prioritas dan rencana implementasi sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2025 sesuai Renstra PD Tahun 2021-2026

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2025 TW 1		TARGET 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS 'SMART CITY'												
F	Mall Pelayanan Publik (MPP)	Jumlah layanan yang beroperasi di Mall Pelayanan Publik	unit		30	1.015.893.700	22	20.000.000	22	20.000.000	22		
1	Koordinasi dan Monev MPP	Jumlah kegiatan koordinasi dan monev MPP	Kegiatan		11	60.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	19	2.18.01.2.06.09	
2	Pengadaan mebelair MPP	Jumlah mebelair	paket		1	195.326.700					1	2.18.01.2.07.05	
3	Pengadaan peralatan MPP	Jumlah peralatan	unit		47	760.567.000					47	2.18.01.2.07.06	
8	PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT												

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data awal (2020)	REALISASI s.d 2025 TW 1		TARGET 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	Kode Subkegiatan	Ket.
					Realisasi Kinerja	Realisasi anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Peningkatan investasi	Persentase peningkatan investasi	%	0,22	3,11	710.218.556	0,05	65.293.000	0,06	405.000.000	0,22		
1	Promosi investasi	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi	Laporan	3	8	292.008.256	3	49.173.000	3	200.000.000	14		
2	Insentif investasi	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	Kegiatan usaha						1	45.000.000	1	2.18.02.2.01.02	
3	Monitoring dan evaluasi investasi	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan monev	Pelaku usaha	100	817	418.210.300	50	16.120.000	250	160.000.000	1250	2.18.05.2.01.03	
G	Kemudahan perizinan usaha mikro	Persentase pengajuan izin usaha mikro yang diterbitkan	%		100	388.991.800	90	16.920.500	90	103.620.000	90		
1	Sosialisasi perizinan usaha mikro	Jumlah pelaku UMK yang mendapatkan sosialisasi	UMK	35	645	388.991.800	50	16.920.500	100	103.620.000	500	2.18.05.2.01.02	

Selain mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak 2021-2026, pelaksanaan program prioritas juga memperhatikan Program Unggulan Bupati periode 2025-2029. Program Unggulan Bupati terpilih 2025-2029 ada 6 (enam) Program Unggulan, yaitu (1) Demak Cerdas dan Berkarakter, (2) Demak Religius, (3) Demak Produktif dan Mandiri, (4) Demak Smart Governance, (5) Demak Mantap, (6) Demak Tangguh dan Lestari. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak merencanakan berkontribusi dalam perwujudan Program Unggulan ke-3 Demak Produktif dan Mandiri. Perwujudan dari program unggulan ke-3 Demak Produktif dan Mandiri salah satunya dengan rencana implementasi peningkatan investasi dengan dukungan aksi prioritas (1) Penyusunan dan publikasi profil investasi daerah, (2) Penguatan layanan perizinan dan perizinan daerah, (3) Promosi dan forum investasi (4) Penyusunan peta potensi dan prioritas investasi, (5) Pendampingan izin usaha mikro dan UMKM. Rumusan rencana program prioritas dan rencana implementasi tahun 2026 sesuai program unggulan Bupati periode 2025-2029 sebagaimana pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4. 3
Rumusan Rencana Program Prioritas dan Rencana Implementasi Tahun 2026 sesuai
Program Unggulan Bupati Periode 2025-2029

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)		PROYEKSI 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR 2029		Kode Subkegiatan	Ket.
				Kinerja	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PP4	Demak Produktif dan Mandiri												
KP3	peningkatan investasi	Nilai realisasi investasi (PMDN & PMA)	Juta Rupiah	3.952.117	445.721.625	4.448.000	240.970.054	5.007.000	306.296.108	7.153.000	524.629.144		
		Jumlah-proyek yang masuk	proyek	2.059		2.550		2.650		2.950			
		Waktu rata-rata pelayanan perizinan	hari	1		1		1		1			
		Jumlah katalog peluang investasi yang tersedia	dokumen	174		174		100		100			
	AP1. Penyusunan dan Publikasi Profil Investasi Daerah	Jumlah Dokumen Proyek Siap Investasi (PSI) dan media promosi digital yang tersedia	dokumen	n/a		-	-	-	-	-	-	2.18.03.2.01.0002	

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)		PROYEKSI 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR 2029		Kode Subkegiatan	Ket.
				Kinerja	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	AP2. Penguatan Layanan Perizinan dan Perizinan Daerah	persentase penguatan aplikasi pelayanan perizinan dan Perizinan daerah yang aktif (Modernisasi sistem, pendampingan usaha kecil)	%	100%	140.818.216	100%	142.983.554	100%	190.795.608	100%	209.844.674	2.18.04.2.01.0006 2.18.04.2.01.0007 2.18.06.2.01.0002	3 Sub Kegiatan
	AP3. Promosi dan Forum Investasi	Jumlah event promosi investasi yang terselenggara (Forum Bisnis Daerah, kunjungan investor, Business Matching)	Kegiatan	3	97.802.009	3	49.173.000	3	56.573.000	3	180.417.050	2.18.03.2.01.0002	
	AP4. Penyusunan Peta Potensi & Prioritas Investasi	Jumlah Peta Potensi & Prioritas Investasi yang dimutakhirkan (Pemutakhiran data potensi)	dokumen	174	30.391.600	174	31.893.000	100	34.607.000	100	55.130.020	2.18.02.2.02.0004	

NO	Program Unggulan/ Rencana Implementasi/ Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)		PROYEKSI 2025		TARGET 2026		TARGET AKHIR 2029		Kode Subkegiatan	Ket.
				Kinerja	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		sektor: agribisnis, pariwisata, manufaktur)											
	AP5. Pendampingan Izin Usaha Mikro dan UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi (NIB, LKPM)	UMKM/ pelaku usaha	300	176.709.800	50	16.920.500	75	24.320.500	150	79.237.400	2.18.05.2.01.0005	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan Rencana Tahunan sebagai turunan dari Perencanaan Strategis (Renstra) yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja (Renja) memberikan gambaran yang lebih detail mengenai tujuan dan sasaran pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada Perubahan tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak akan melaksanakan 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan harapan seluruh Program dan Kegiatan tersebut dapat direalisasi secara baik sesuai apa yang telah direncanakan.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 merupakan acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, masyarakat dan semua pelaku pembangunan dalam mencapai sinergitas pelaksanaan program pembangunan di Daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, masyarakat dan semua pelaku pembangunan berkewajiban melaksanakan program - program Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 dengan sebaik-baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan publik;
3. Pada Awal tahun anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2025, serta kesesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD Kabupaten Demak;

4. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap bulan kepada Bupati Demak melalui Bappelitbangda Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Adapun Rencana Tindak Lanjut dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2025, di bidang penanaman modal guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya:

1. Mengoptimalkan Pengembangan iklim penanaman modal;
Optimalisasi pengembangan iklim penanaman modal dengan kegiatan pembuatan peta potensi investasi kabupaten dengan cara memanfaatkan media buku, dokumen dan online/website.
2. Mengoptimalkan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
Optimalisasi Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang ada dengan melibatkan seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia.
3. Mengoptimalkan Pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal;
Optimalisasi Pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dengan kegiatan penyediaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten melalui Mal Pelayanan Publik dan Perizinan online.
4. Mengoptimalkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
Optimalisasi pengelolaan dan penyajian data penanaman modal dengan kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten melalui pemberdayaan sumber daya manusia yang ada; memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, serta mengelola Sistem

Informasi yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

Dengan telah tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini agar senantiasa dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap Program dan kegiatan serta tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dan dipedominya untuk meningkatkan Kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Lampiran 1.

HASIL PENYESUAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA PADA RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021-2026 DENGAN KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-3406 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

SEMULA								MENJADI									
URUSAN / UNSUR	BIDANG / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	URUSAN / UNSUR	BIDANG / BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				X	X				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Persentase	X	X	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	Persentase

							Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	Persentase								Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah yang ditindaklanjuti	Persentase
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	X	X	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen
2	18	01	2.01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	X	X	01	2.01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
2	18	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	X	X	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
2	18	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen DPA--SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	X	X	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya Dokumen DPA--SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
2	18	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	X	X	01	2.01	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan

2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen	X	X	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan	Dokumen
2	1	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	X	X	0	2.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
2	1	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	X	X	0	2.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
2	1	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang sudah direkonsiliasi	Laporan	X	X	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik daerah yang sudah direkonsiliasi	Laporan
2	1	0	2.	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	X	X	0	2.	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
2	1	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase	X	X	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase
2	1	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	X	X	0	2.	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
2	1	0	2.	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	X	X	0	2.	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
2	1	0	2.	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	X	X	0	2.	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang

2	1	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase	X	X	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Persentase
2	1	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	X	X	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
2	1	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	X	X	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
2	1	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	X	X	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
2	1	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	X	X	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
2	1	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	X	X	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen
2	1	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	X	X	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
2	1	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	X	X	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
2	1	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	X	X	0	2.	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen

2	1	0	2.	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	X	X	0	2.	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
	8	1	0	11							1	0	0				
2	1	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik daerah yang diadakan	Unit	X	X	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik daerah yang diadakan	Unit
	8	1	0	7							1	0	7				
2	1	0	2.	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	X	X	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
	8	1	0	02							1	0	0				
2	1	0	2.	00	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	X	X	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
	8	1	0	05							1	0	0				
2	1	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	X	X	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
	8	1	0	06							1	0	0				
2	1	0	2.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	X	X	0	2.	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
	8	1	0	10							1	0	0				
2	1	0	2.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	X	X	0	2.	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
	8	1	0	11							1	0	0				

2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Persentase	X	X	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	Persentase
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	X	X	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	X	X	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Unit	X	X	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara	Unit
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	X	X	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	X	X	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit

2	1 8	0 1	2. 0 9	00 05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Uni t	X	X	0 1	2. 0 9	0 0 5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
2	1 8	0 1	2. 0 9	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Uni t	X	X	0 1	2. 0 9	0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
2	1 8	0 1	2. 0 9	00 09	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Uni t	X	X	0 1	2. 0 9	0 0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Unit
2	1 8	0 1	2. 0 9	00 10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Uni t	X	X	0 1	2. 0 9	0 1 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Unit
2	1 8	0 1	2. 0 9	00 11	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Uni t	X	X	0 1	2. 0 9	0 0 1 1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	Unit
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2					URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	1 8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				2	1 8				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENANAMAN MODAL			

2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	Rupiah
2	182	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan dan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	dokumen	2	182	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah penetapan dan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	dokumen
2	182	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	2	182	02	2.01	001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
2	182	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	2	182	02	2.01	003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen
2	182	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	2	182	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen
2	182	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	182	02	2.02	001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

2	1	0	2	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	0	2.	0	0	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen
2	1	0			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Rasio promosi terhadap jumlah investor	Angka	2	1	0				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Rasio promosi terhadap jumlah investor	Angka
2	1	0	2.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Laporan	2	1	0	2.	0	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah laporan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Laporan
2	1	0	2.	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal				2	1	0	2.	0	0	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen
2	1	0	2.	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	0	2.	0	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen
2	1	0			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	Ketetapan	2	1	0				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Jumlah perizinan yang dikeluarkan sesuai standar	Ketetapan

2	1 8	0 4	2. 0 1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar	Ketetapan	2	1 8	0 4	2. 0 1		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah ketetapan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal yang ditangani sesuai standar	Ketetapan
2	1 8	0 4	2. 0 1	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik bagi Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	2	1 8	0 4	2. 0 1	0 0 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	1 8	0 4	2. 0 1	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pemenuhan Kepatuhan atas Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	2	1 8	0 4	2. 0 1	0 0 8	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha

2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Orang	2	18	04	2.01	00	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan Usaha	2	18	04	2.01	00	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah investor (PMDN/PMA)	Proyek / investor	2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Jumlah investor (PMDN/PMA)	Proyek/ investor
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang telah dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	2	18	05	2.01	00	01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perusahaan yang telah dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%

2	1 8	0 5	2. 0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha.	2	1 8	0 5	2. 0 1	0 0 4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.
2	1 8	0 5	2. 0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	2	1 8	0 5	2. 0 1	0 0 5	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha
2	1 8	0 5	2. 0 1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	2	1 8	0 5	2. 0 1	0 0 6	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha
2	1 8	0 6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial	Data	2	1 8	0 6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Jumlah informasi penanaman modal yang ditampilkan dalam media sosial	Data

2	1 8	0 6	2. 0 1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia	Data	2	1 8	0 6	2. 0 1		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota yang tersedia	Data
2	1 8	0 6	2. 0 1	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	1 8	0 6	2. 0 1 2	0 0 0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen